

PENDIDIKAN KARAKTER

UNTUK MELAHIRKAN PEMIMPIN MASA DEPAN BANGSA

Oleh:
Dr. Anwar Senen, MPd.

*Disampaikan dalam seminar nasional Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Salatiga pada tgl. 17 November 2015.*

Abstrak

Dewasa ini, sikap dan perilaku sebagian generasi muda sudah banyak meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa yang santun, rendah hati, dan patriotik. Perkelahian, kriminalitas, dan amoral telah menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Keharmonisan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan kualitasnya. Pendidikan karakter sudah menjadi kebutuhan mendesak guna membentuk watak generasi muda agar memiliki kepribadian yang luhur. Sebab, generasi muda pada saatnya nanti akan melanjutkan kepemimpinan pendahulunya untuk meneruskan pembangunan nasional yang dinamis, konstruktif, dan bertanggung jawab. Kearifan lokal Jawa sebagai bagian dari budaya nasional bisa menjadi sumber pembelajaran guna membentuk karakter generasi muda.

Pendahuluan

Seminar nasional yang diselenggarakan oleh adik-adik mahasiswa HMJ PGMI IAIN Salatiga bertema “Pendidikan karakter untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan” tepat diusung pada situasi sekarang ini. Tema ini menunjukkan, bahwa para mahasiswa PGMI IAIN Salatiga memiliki kepekaan sosial cukup membanggakan dilihat dari perspektif kebangsaan. Tema besar ini mengandung nilai edukatif dan *spirit leadership* yang tangguh berkarakter dari para mahasiswa guna menciptakan generasi muda bangsa yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan karakter.

Kenyataan menunjukkan, bahwa di antara generasi muda terdidik dan berprestasi masih banyak juga generasi muda yang memiliki sikap dan perilaku meresahkan di lingkungan hidup bermasyarakat. Kita sering disuguhi pemberitaan adanya perkelahian antar pelajar, antar mahasiswa di mana mereka tergolong kelompok generasi terdidik. Demikian pula perilaku kriminal dan amoral yang dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya masih fokus belajar di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di sekolah seolah-olah tidak memiliki pengaruh kebaikan kepada generasi muda. Dalam konteks ini, *wewaler* dalam kearifan lokal Jawa yang mengatakan *Aja*

dumeh pinter, tumindakke banjur keblinger (jangan mentang-mentang pandai kemudian tindakannya menyimpang dari tatanan) dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan karakter.

Pada sisi yang lain, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa peristiwa konflik sosial yang pernah terjadi di masyarakat telah menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Banyak kasus bentrokan antar warga yang berujung menjadi konflik sosial yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan latar belakang politik, ekonomi, etnis, agama, dan lain-lain. Kerusuhan dan bentrokan yang pernah terjadi di Papua, Ambon, Poso, Aceh, Talangsari (Lampung), Sampit (Kalimantan), Sampang (Madura), dan di Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY) adalah beberapa contoh peristiwa pemaksaan kehendak antara individu satu kepada individu lain atau satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain sehingga berujung pada konflik sosial yang memprihatinkan.

Setahun yang lalu, bentrokan dan kerusuhan di DIY yang melibatkan isu etnisitas dan agama cukup mengusik ketenangan dan kedamaian masyarakat Yogyakarta. Pada pertengahan tahun 2014 keharmonisan masyarakat di DIY terusik oleh berbagai peristiwa kekerasan dan bentrokan karena persoalan intoleransi. Menurut aktivis Makaryo (Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta) ada 8 kasus kekerasan yang terjadi di Yogyakarta. Delapan kasus kekerasan dan bentrokan antarwarga tersebut terkait intoleransi dengan latar belakang agama.

Konflik sosial seharusnya bisa dihindari apabila antara individu atau kelompok satu dengan lainnya memiliki rasa toleransi dan empati sehingga bisa saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan yang mereka miliki. Kenyataannya, untuk sebagian warga negara masih perlu diperjuangkan agar dapat memahami atau memiliki kesadaran toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, *pituduh* di dalam kearifan lokal Jawa yang mengatakan *Rukun agawe santosa crah agawe bubrah* (bersatu bisa membuat kita teguh/kuat, bercerai berai bisa membuat kita rusak/lemah) bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pendidikan karakter bangsa.

Pendidikan Karakter

Ada beberapa pengertian tentang karakter. Menurut Budimansyah (2010: hlm. 23) karakter merupakan format dasar diri manusia yang berupa nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam diri dan menjadi pedoman seseorang dalam berperilaku. Hal ini sesuai dengan definisi karakter oleh Puskur (2010: hlm. 6) yang memberikan arti bahwa karakter sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai

kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sementara, Dewantara (1962: hlm. 25) berpendapat bahwa istilah “karakter, watak, budi pekerti” sebagai sebuah kebulatan jiwa manusia atau bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang selalu menimbulkan tenaga.

Ada dua kebajikan fundamental yang dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik, yaitu rasa hormat (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Kebajikan itu merupakan nilai moral fundamental yang harus diajarkan dalam pendidikan karakter (Lickona, 1991:hlm. 43-45). Selain dua kebajikan fundamental itu, menurut Lickona (2004: hlm. 7-11) ada sepuluh kebajikan esensial yang dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik. Kesepuluh kebajikan esensial itu adalah kebijaksanaan (*wisdom*), keadilan (*justice*), ketabahan (*fortitude*), pengendalian-diri (*self-control*), kasih (*love*), sikap positif (*positive attitude*), kerja keras (*hard work*), integritas (*integrity*), penuh syukur (*gratitude*), dan kerendahan hati (*humility*).

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Wiyani, 2013: hlm. 27). Pendidikan karakter sejatinya adalah pendidikan yang tidak hanya mengandalkan dan mengasah kecerdasan intelektual semata, tetapi juga membangun karakter warga negara berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan yang bertumpu pada *Pancasila* sebagai *ideology* Negara. Pendidikan karakter adalah sebuah proses pengembangan diri dengan kesadaran penuh sebagai manusia yang bermartabat sekaligus sebagai warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta memiliki kemauan besar untuk mempertahankan martabat bangsa (Mulia dan Aini, 2013; hlm. 19).

Menurut T. Ramli yang dikutip Sudrajad (2010: *on line*), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Dalam konteks pembangunan nasional, Affandi (2013: hlm. 77) mengatakan bahwa untuk mengubah masa depan Indonesia yang lebih baik kita perlu merekayasa diri dengan membangun pondasi bangsa dan negara yang kokoh. Pembangunan dimulai dari filsafat hidup dan *ideology* bangsa. Dalam hal ini dikatakan oleh Affandi, bahwa pilar kebangsaan sebagai pondasi bangsa berupa 1) NKRI, 2) Pancasila, 3) UUD 1945, 4) Bhinneka Tunggal Ika, 5) Bendera merah putih, dan 6) Garuda Pancasila. Sebab, keenam pondasi tersebut sejauh ini terbukti menjadi perekat terbaik dalam kebhinnekaan dan pluralitas bangsa ini. Sekarang saatnya pondasi itu diperkuat landasannya.

Menciptakan Keharmonisan dengan *Spirit* Bhinneka Tunggal Ika Berlandaskan Pancasila

Bangsa Indonesia yang multi etnik memiliki potensi kerawanan sosial yang berlatar belakang SARA. Beruntung nenek moyang telah memberikan warisan luhur yang ada pada nilai-nilai yang terkandung di dalam *spirit* Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. *Spirit* Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya nasional telah membuktikan menjadi alat pemersatu yang handal bagi bangsa Indonesia sampai saat ini. Oleh sebab itu, berbagai isu disintegrasi bangsa yang dipicu sikap intoleransi yang terjadi akhir-akhir ini perlu upaya pencarian solusi yang bijaksana. Salah satu cara yang dilakukan adalah revitalisasi kearifan lokal budaya yang ada di berbagai daerah guna mengembangkan sikap toleransi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika (Senen, 2015: hlm.42).

Di dalam laporan CMEC bekerjasama dengan *Canadian Commission for UNESCO* (2001: hlm. 13) mengatakan:

“The world as global village: All societies interact with others. This fact necessitates the defining of the values particular to one’s own culture as well as one’s self, and the recognition and respect of those of others. In addition, the need to be cognizant of individuals’ responsibilities as citizens of the world is emphasized by the ease and speed of global communication. Further, rapid social change requires a commitment by each individual to engage in the preservation of social harmony at the local and global levels”.

Bahwa, semua masyarakat berinteraksi dengan orang lain. Fakta ini mengharuskan mendefinisikan nilai-nilai tertentu dengan budaya sendiri, pengakuan diri dan penghormatan dari orang lain sebaik mungkin. Selain itu, harus menyadari bahwa tanggung jawab individu

sebagai warga dunia adalah ditekankan oleh kemudahan dan kecepatan komunikasi global. Selanjutnya, perubahan sosial yang cepat memerlukan komitmen pada setiap individu untuk terlibat dalam pelestarian sosial yang harmonis di tingkat lokal dan global.

Kedamaian dan keharmonisan yang kita dambakan akan sulit terwujud apabila setiap anggota masyarakat tidak bisa menghormati atau menghargai adanya perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang dilaporkan oleh CMEC (2001: hlm. 32) bekerjasama dengan *Canadian Commission for UNESCO* yang menyatakan :

“Peace has many dimensions. It is not only a state of relationships among nations. We cannot expect to live in a world of peace if we are unable to live in peace with those close to us — even those who differ from us.... The responsibility for peace begins with each person, in relationships with family and friends, and extends to community life and national activities...”

...that peace is rooted not in treaties and declarations but in the mind and heart of every person”.

Bahwa, damai memiliki banyak dimensi. Hal ini tidak hanya keadaan hubungan antar bangsa. Semua orang tidak dapat berharap untuk hidup dalam dunia yang damai jika tidak dapat hidup dalam damai dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar - bahkan mereka yang berbeda dengan lainnya. Tanggung jawab untuk perdamaian itu dimulai bersama dengan setiap orang, dalam hubungan dengan keluarga dan teman, dan meluas ke kehidupan masyarakat dan kegiatan nasional. Bahwa perdamaian itu tidak hanya berakar pada perjanjian dan deklarasi tetapi dalam pikiran dan hati setiap orang.

Unsur yang membentuk bangsa dan negara Indonesia adalah suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, dan agama. Persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia digambarkan dalam lambang negara “Garuda Pancasila” dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Bhinneka tunggal Ika memiliki makna meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat berbeda, kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, memiliki ragam yang berbeda-beda, dan terdiri dari beribu-ribu pulau di wilayah Nusantara, namun keseluruhannya adalah merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia (Budimansyah, 2008: hlm. 26-50).

Menurut Kosasih (2012: hlm. 310) bahwa kearifan lokal seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, dan sikap ketauladanan lainnya mulai banyak terkikis di dalam lingkungan budaya masyarakat. Visi dan ideologi pembangunan lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi, perkembangan fisik, dan material dibandingkan dengan nilai spiritualitas dan kearifan lokal (*local wisdom*). Kini keberhasilan dan kesuksesan seorang tokoh masyarakat (*elite*) tidak diukur sejauhmana peran sosialnya dan pengabdianya

di tengah masyarakat, tetapi kekayaan yang dimilikinya-lah yang menjadi ukuran. Benturan nilai itu tidak jarang membuat masyarakat mulai bingung dan mengalami krisis identitas, dan tidak mustahil akan terjadi perpecahan bangsa dan mengoyak NKRI. Di dalam situasi kebingungan mencari rujukan untuk memecahkan berbagai permasalahan, ada kecenderungan masyarakat ingin kembali kepada kearifan lokal yang sudah teruji berabad-abad keampuhannya dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Hal ini ditengarai sebagai ekspresi dari rasa optimisme.

Masyarakat dan bangsa Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik tetapi sekaligus adalah masyarakat yang monopluralistik dan monodualistik. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang monopluralistik dalam dimensi suku, agama, ras, antar golongan, kebiasaan dan adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, kebudayaannya, dan mendiami ribuan pulau besar dan kecil tetapi menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang bernaung dalam wadah NKRI. Manusia dan masyarakat Indonesia juga adalah makhluk monodualistik tersusun sebagai satu kesatuan dari susunan kodrat sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniah serta dari kedudukan kodrat sebagai makhluk individu dan sosial. Masyarakat pluralistik yang hidup harmonis dalam kesatuan hidup berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI ini digambarkan dalam semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” (Sukadi, 2012: hlm. 86).

Pada situasi sekarang ini, di mana banyak persoalan menyangkut pelemahan nilai moral bangsa yang mengarah pada kepentingan kelompok diberbagai bidang kehidupan diperlukan adanya solusi pemecahan, salah satunya melalui proses pendidikan di sekolah. Pendekatan pendidikan karakter menurut para ahli pendidikan dianggap tepat sebagai salah satu solusi yang perlu diterapkan oleh para guru. Menurut Nashir (2013: hlm. 5) dewasa ini Lembaga pendidikan di Indonesia memiliki beban yang berat dalam menghadapi pelemahan nilai dan orientasi kebangsaan seperti masalah cinta tanah air, ikatan kebangsaan, solidaritas kebangsaan, jatidiri bangsa, dan lebih luas lagi dalam membela martabat dan kedaulatan bangsa di tengah berbagai ekspansi nilai-nilai luar yang memperlemah kebangsaan.

Winataputra (2008) berpendapat, perlu dikembangkan budaya kewarganegaraan Indonesia yang multikultural, yang berintikan “*civic virtue*” atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan. Kabajikan itu sepenuhnya harus terpancar dari nilai-nilai Pancasila yang secara substantif mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan multikultural. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Mantan Mendikbud Muh. Nuh (<http://berita.upi.edu/2011/10/31>) dalam sambutannya pada sidang UNESCO di Paris Perancis, mengatakan “Dengan memahami makna toleransi, bangsa Indonesia bisa mencegah konflik rasial, etnis, budaya, dan spiritual untuk membangun kehidupan damai dan secara beriringan, sekaligus dapat membangun masyarakat yang kreatif untuk meningkatkan produktivitas”. Selanjutnya dikatakan “Pentingnya toleransi dan kejujuran ini merupakan kebutuhan pendidikan karakter yang menjadi bagian dari kurikulum sekolah yang tertanam dalam setiap mata pelajaran dan diajarkan pada semua tahap pendidikan, terutama pada tahap awal.”

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konsep *nation and character building*, yaitu membangun karakter dan peradaban kehidupan bangsa. Membangun karakter kehidupan berbangsa jelas terkait dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk ini pendidikan haruslah mampu memberdayakan dan membudayakan generasi muda agar selalu berpikir, memiliki orientasi nilai dan sikap, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa dinamis sepanjang masa. Sedangkan membangun peradaban kehidupan berbangsa adalah mengaktualisasikan kepribadian bersama tersebut menjadi aktivitas sosial budaya yang akan mewarnai keunggulan dan kemajuan kehidupan berbangsa di tengah-tengah era globalisasi ini (Senen, 2015: hlm.46).

Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Jawa

Guru memiliki peranan penting membangun karakter siswa sebagai generasi muda untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara Indonesia melalui tema budaya yang ada di dalam kurikulum. Kearifan lokal Jawa dalam bentuk *wewaler* atau *pituduh* atau *petatah petitih* bisa dikembangkan oleh guru dalam proses pendidikan guna membangun bangsa Indonesia (generasi muda) agar tetap kokoh kuat menjalankan pembangunan dengan cara saling menghormati, menghargai dan tidak memaksakan kehendak kepada individu atau kelompok lainnya. Kearifan lokal Jawa dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa bukan berarti ingin mengedepankan semangat etnisitas. Justru, kearifan lokal Jawa ikut berkontribusi mempererat dan memperkuat bangunan moral kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dengan *spirit* Bhinneka Tunggal Ika.

Rukmana (1993: hlm. xi) mengatakan, sesungguhnya Bangsa Indonesia telah berabad-abad mengenal budaya hidup yang religius. Menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, manusia berkeinginan selalu dekat dengan Tuhan. Butir-butir mutiara budaya Jawa baik

“pituduh” maupun “wewaler” akan menjadikan manusia Indonesia memiliki sifat *ber budi bawa leksana* ialah manusia Indonesia yang bersifat *becik sajatining becik* (baik benar-benar baik yang baik) dan tidak akan sukar meningkatkan kesadarannya sebagai Bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara/berpemerintahan, bermasyarakat berdasarkan Pancasila. Rukmana (1993: hlm. 108) mengatakan bahwa “*Bangsa iku minangka sarana kuwating Negara, mula aja nglirwakake kebangsaanira pribadi, supaya kanugrahan bangsa kang handana warih*”. Artinya, bangsa itu sebagai sarana untuk kuatnya suatu Negara, oleh karena itu jangan mengabaikan rasa kebangsaanmu sendiri, agar memiliki bangsa yang berjihad ksatria.

Pada masyarakat Jawa ada budaya *unggah-ungguh* dalam berbahasa dan berperilaku-perilaku yang telah berlaku dari nenek moyang turun-temurun. *Unggah-ungguh* ini menjadi bagian penting dalam membangun moral saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui *unggah-ungguh* orang Jawa mengikuti aturan tatakrama bagaimana berkata atau bersikap-perilaku antara yang muda dengan yang tua, antara murid dengan guru, dan antara bawahan dengan atasan. Demikian pula dalam suatu acara yang dihadiri oleh banyak orang maka para pejabat akan di tempatkan pada deretan paling depan dan orang biasa di tempatkan di belakang. Melalui *unggah-ungguh* orang Jawa telah memiliki kepastian dalam berbahasa dan bersikap-perilaku dalam pergaulan hidup sehari-hari. Orang Jawa yang dapat menempatkan diri sesuai dengan *unggah-ungguh* akan dapat menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat (Senen, 2015: hlm.91-92).

Nilai Budaya Jawa adalah konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat mengenai apa yang dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman hidup bagi masyarakat Jawa. Nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal ini disebabkan oleh karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat. Sistem nilai budaya Jawa adalah a) konsep tentang nilai keagamaan, b) konsep tentang tata krama / sopan-santun, c) konsep tentang kerukunan, d) konsep tentang ketaatan anak terhadap orang tua, e) konsep tentang disiplin dan tanggung jawab, f) konsep tentang kemandirian. Pada masyarakat Jawa, kebudayaan atau nilai budaya memiliki fungsi sebagai pengarah dan pendorong bagi kelakuan manusia, mempengaruhi pilihan makna dan perilaku. Fungsi ini dicapai dengan menjabarkannya menjadi tata aturan yang lebih konkrit yaitu

norma positif maupun norma negatif, sebagian besar nilai ditaati karena kebenarannya telah menjadi keyakinan individu (Rachim dan Nashori, 2007: hlm. 33-34).

Bahasa Jawa dalam konteks bahasa ibu, adalah sarana komunikasi bagi masyarakat Jawa yang memiliki *nilai budi pekerti luhur* sehingga dapat menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dapat dijadikan bahasa pengantar dalam proses pendidikan di sekolah karena bagi masyarakat Jawa nilai moral yang terkandung dalam *pituduh* atau *wewaler* Jawa mengandung makna cukup strategis dalam mengembangkan karakter siswa.

Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu pada dasarnya mengandung nilai budi pekerti. Hal ini, sesuai dengan Perda Propinsi DIY No. 4/2011 yang mengatakan:

“Sebagai sarana komunikasi, Bahasa Jawa menunjukkan dan sekaligus mengatur hubungan antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks komunikasinya. Itulah mengapa, dalam Bahasa Jawa dikenal tingkatan-tingkatan berbahasa dalam berkomunikasi (*unggah-ungguhing basa*) sesuai posisi masing-masing pihak dalam tata komunikasi, agar harmoni pergaulan sosial tetap terjaga dengan baik.

Harmoni pergaulan sosial akan tetap terjaga dengan baik, apabila setiap orang mengerti dengan tepat posisinya dan dapat menggunakan bahasa dengan tepat. Tepat penggunaan kata-kata baik dalam mentaati kaidah-kaidah Bahasa Jawa yang baik dan benar maupun perspektif waktu, tempat, dan konteks (*empan papan duga prayoga*). Barang siapa dapat menggunakan bahasa dengan tepat, maka dia telah mengerti dan mampu mempraktekan tata krama, dan ia terjauhkan dari celaan (*tata krama iku ngadohke ing panyendhu*). Sesungguhnya, cara berbahasa seseorang menunjukkan watak dan kepribadiannya. Mengingat betapa pentingnya bahasa ini, maka Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta harus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa Jawa, baik dalam bentuk tuturan maupun tulisan, di dalam pergaulan hidup yang wajar, dan menjadikannya salah satu mata pelajaran dalam dunia pendidikan.” (Perda Propinsi DIY, No.4/2011: hlm. 25).

Setiap daerah memiliki bahasa ibu yang dapat menjelaskan tujuan penggunaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung (bahasa ibu) bernilai budaya dan sesuai dengan moral Pancasila dengan *spirit* Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab hal tersebut maka *pituduh* atau *wewaler* Jawa dapat dijadikan sebagai pengantar untuk mengembangkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di sekolah.

Untuk menciptakan keharmonisan hidup ada *piwulang* Jawa yang mengatakan *Rukun agawe santosa, Crah agawe bubrah*. Artinya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berikut

ini adalah beberapa *pituduh* atau *wewaler* Jawa yang dimungkinkan dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.

Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Manusia memang jangan mengikat diri pada dunia, melainkan hendaknya menjadi bebas hatinya dari dunia, bisa melepaskan diri dari nafsu-nafsu sekaligus pamrihnya, sehingga dapat memenuhi tugasnya masing-masing dalam dunia demi pemeliharaan masyarakat (*rame ing gawe*), artinya manusia hendaknya memenuhi kewajiban-kewajiban di dunia, “kewajiban bekerja keras” untuk diri sendiri, bekerja untuk keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan atau kesejahteraan dunia. Setiap manusia hendaknya melakukan apa yang dituntut oleh kewajiban-kewajibannya di tempat di mana harus berperan, baik sebagai petani, pegawai atau sebagai raja, menerima dan setia pada tugas dan kewajiban masing-masing. Jika manusia sudah *sepi ing pamrih*, tidak lagi mengejar kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan keselarasan secara keseluruhan, maka ia berada di tempat yang tepat di alam ini dan dengan sendirinya sudah menyesuaikan diri dengan masyarakat (*rukun*) dan *hormat* dengan mengakui tatanannya (Rachmatullah, 2011: hlm. 54).

Ajining diri gumantung ana ing lati, ajining raga gumantung ana ing busana. Artinya, seseorang tergantung pada ucapannya dan kepribadian tindakannya. Maknanya, harga diri seseorang dapat dilihat dari ucapan dan budi-bahasanya. Oleh karena itu, kalau bicara harus dipikir dengan segala resiko, jangan bicara tanpa isi atau tanpa bobot.

Aja ngomong waton, nanging ngomonga nganggo waton Artinya, *aja ngomong waton* (jangan asal berbicara), *nanging ngomonga nganggo waton* (tetapi, bicaralah dengan menggunakan patokan atau dengan alasan yang jelas). Peribahasa tersebut merupakan ajakan untuk berbicara dengan cara yang tidak ngawur atau *ngayawara*. Usahakan setiap pembicaraan benar-benar memiliki landasan ataupun alasan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena, kalau hanya asal berbicara, salah-salah akan disamakan dengan “orang gila”. Biasanya, peribahasa ini digunakan untuk mengingatkan siapapun yang suka mengejek-ejekkan orang lain, menganggap buruk atau salah terhadap hal-hal yang sesungguhnya tidak dimengerti, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain.

Untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, setiap tutur kata perlu dijaga, dicermati, diatur sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan rasa tidak senang dari lawan bicara. Jika ada masalah, jangan dibesar-besarkan, terlebih jika belum jelas duduk perkaranya. Bagaimanapun, setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita akan didengarkan dan diperhatikan oleh orang lain. Lewat tutur kata itulah, seseorang dapat

memperoleh kepercayaan. Sebaliknya, lewat tutur kata pula, seseorang dapat kehilangan kepercayaan. Lewat tutur kata, dapat terjadi perkelahian, kekeliruan, dan kekacauan di dunia.

Aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa Artinya, *aja rumangsa bisa* (jangan merasa bisa) *nanging bisa rumangsa* (tetapi, bisa merasa). Merasa bisa adalah sifat tidak terpuji karena dinilai sebagai wujud kesombongan. Sebab, hasil kerja orang seperti ini biasanya tidak sebaik yang dijanjikan. Sementara itu, dapat merasa atau menggunakan perasaan adalah sifat yang baik karena merupakan landasan sikap tenggang rasa antar sesama. Dalam peribahasa ini, “merasa bisa” dianggap sebagai sikap yang gegabah. Sebab, “merasa bisa”, belum tentu bisa. Lebih berbahaya lagi, dari merasa bisa kemudian mengaku bisa, dan berani mengatakan bisa. Sifat seperti itu dianggap buruk. Seandainya yang bersangkutan dipercaya melaksanakan pekerjaan yang dirasanya bisa, dan ternyata gagal, apakah tidak memalukan dan merugikan semua pihak?

Bisa rumangsa berarti tahu diri, yaitu, berani “merasa tidak bisa” dan “mengakui tidak bisa”. Pada sisi lain, *bisa rumangsa* juga berarti memiliki kesadaran yang cukup dalam mengukur diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan mengamalkan sifat seperti itu, pribadi yang bersangkutan akan memperoleh ketenteraman dan ketenangan hidup di lingkungannya. Ia akan dinilai sebagai orang yang jujur, tidak sombong, dan mampu menempatkan diri dengan baik di dalam masyarakatnya.

Tepo sliro. Tepa (ukuran), *slira* (badan). Jelasnya diukur atau dikenakan dibadan sendiri, atau *ditepakake awake dhewe*. Jadi yang dimaksud *tepa slira* adalah imbauan agar segala sesuatu yang terjadi diusahakan untuk diukur atau diterapkan pada diri sendiri. Dengan demikian, sikap dan perbuatan kita tidak akan semena-mena, atau semau sendiri tanpa mempedulikan orang lain. *Tepa slira* merupakan salah satu ajaran penting di Jawa dalam menciptakan tenggang rasa. Contohnya, kalau merasa sakit ketika dicubit, maka janganlah mencubit orang lain. Jika tersinggung kalau diejek mengenai kelemahan diri sendiri, maka jangan pula mengejek kelemahan orang lain, karena dia juga pasti tersinggung. Dengan memiliki kebiasaan mengukur (menerapkan) segala sesuatu di badan sendiri, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha menghargai orang lain. Tutur katanya dijaga agar tidak menyinggung (menyakiti) siapapun lawan bicaranya, perangnya lembut karena menyadari bahwa hidup tidak mungkin sendirian dan selalu membutuhkan orang lain. Orang yang telah mengamalkan sifat *tepa slira* akan jauh dari sikap *gumedhe* (merasa besar), *kuminter* (merasa pandai), *sawiyah-wiyah* (semena-mena), *kumalungkung* (angkuh), *daksiya* (suka menyiksa/dholim), dan sebagainya yang tidak disukai, menyakitkan, dan merugikan orang lain.

Ngono ya ngono, ning aja ngono. Artinya, *ngono ya ngono* (begitu ya begitu) *ning aja ngono* (tetapi, jangan begitu). Peribahasa tersebut merupakan peringatan agar orang tidak berbuat berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru yang tidak diduga., serta mengganggu orang lain. Garis besarnya jangan suka berbuat semau sendiri. Segala tindak perbuatan harus dipertimbangkan masak-masak. Sebab, jika berlebihan, akan mendapat teguran, karena perbuatan tersebut dapat merugikan atau mengganggu orang lain. Contoh perbuatan seperti itu banyak. Misalnya, boleh saja mengagih hutang yang lama belum dibayar. Tetapi, jangan dilakukan di depan umum, karena akan membuat malu pihak yang akan ditagih. Sebab, jika yang bersangkutan merasa dipermalukan, mungkin saja dia akan marah dan lupa diri. Kalau sudah demikian apa jadinya? Bisa saja urusan tagih -menagih hutang itu akan berubah menjadi pertengkaran belaka.

Desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya, *desa mawa cara* (desa mempunyai adat sendiri), *negara mawa tata* (negara memiliki tatanan, aturan, atau hukum tertentu). Peribahasa tersebut memuat inti dari pandangan kalangan tradisional Jawa yang menghargai adanya pluralitas dengan segala perbedaan adat kebiasaannya. Kaitannya dengan pandangan ini, desa telah membentuk kebiasaan (*angger-angger*) untuk lingkungan sendiri yang cenderung lebih lentur. Sementara negara memang memerlukan hukum atau peraturan yang lebih tegas, namun bersumber pada adat istiadat yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Peribahasa ini juga mengingatkan kepada para pendatang yang tinggal di daerah lain. Di manapun berada, seseorang harus pandai-pandai memahami, menghormati, dan menyesuaikan diri dengan adat-istiadat setempat. Mana yang disetujui digunakan, mana yang tidak disepakati jangan diterapkan. Meskipun demikian, janganlah melecehkan nilai yang tidak disetujui, terlebih bermaksud mengubahnya secara drastis. Sebab, perbuatan tersebut kemungkinan besar dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak lain yang berujung pada friksi dan konflik yang tidak diinginkan (Susilo, 2012: hlm.9-46)

Penutup

Pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kepribadian generasi muda (siswa) agar memiliki kekuatan moral yang baik sehingga dapat menjadi pedoman hidup di masyarakat berbangsa dan bernegara. Kekuatan moral yang baik yang dimiliki generasi muda bangsa akan menjadikan generasi bangsa bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab. Diharapkan, dedikasi dan

tanggung jawab yang dimiliki generasi muda menjadi karakter yang membanggakan dalam mengemban pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adalah tugas madrasah atau sekolah atau kampus mengawal gerak langkah generasi muda melalui proses pendidikan. Pendidikan karakter yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal Jawa yang terkandung di dalam budaya bangsa perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dengan *spirit* Bhinneka Tunggal Ika untuk menghindari munculnya semangat etnisitas. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan lokal Jawa yang terkandung dalam budaya daerah memiliki kontribusi optimal dalam ikut berkontribusi mempererat semangat nasionalisme yang dinamis dan konstruktif. Wallahu'alam.

Daftar Pustaka

- Affandi, Idrus. (2013). *Idealis, Pragmatis, dan Religius*. Bandung. UPI bekerjasama dengan Mutiara Press.
- Budimansyah, Dasim. (2008). *Pembelajaran Pembudayaan Nilai Pancasila*. Bandung: PT. Genesindo.
- Budimansyah, Dasim. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- CMEC. (2001). "Education For Peace, Human Rights, Democracy, International Understanding And Tolerance." *Report of Canada. By The Council of Ministers of Education, Canada in collaboration with the Canadian Commission for UNESCO* October 2001. Tersedia *On Line*.
- Dewantara, K. H. (1962). *Karja Ki Hajar Dewantara*. Jogjakarta: Madjelis luhur persatuan Taman Siswa.
- Kosasih, Dede. (2012). "Eksplorasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Idiomatik Sunda Berbasis Etnopedagogi sebagai Upaya untuk Mencegah Perpecahan Bangsa". Kumpulan Makalah: *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter*, Editor Dasim Budimansyah. Bandung: Widya Aksara Press.
- Lickona, Thomas (1991). *Educating for Character*. New York. Toronto. London. Sydney. Auckland: Bantam Books.
- Lickona, Thomas. (2004). *Character Matters*. New York: Somon & Schuster.
- Mulia, Siti Musdah &. Aini, Ira D. (2013). *Karakter Manusia Indonesia*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Nashir, Haedar. (2013). *Pendidikan Karakter Berbasis Agama&Budaya*. Yogyakarta: Multi Presindo.
- PERDA PROPINSI DIY No.4 Tahun 2011 (*tersedia on line*).
- Pusat Kurikulum. 2010. *Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Kementerian Pendidikan Nasional. Tersedia *On Line*.
- Rachim, Ryan L. Dan H. Fuad Nashori. "Nilai Budaya Jawa dan Perilaku Nakal Remaja Jawa." *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*. Vol. 9, No. 1, Mei 2007. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII. (Hal. 30-43)
- Rukmana, Hardiyanti. (1993). *Butir-Butir Budaya Jawa*. Jakarta: Yayasan Purna Bhakti Pertiwi.

- Soesilo. (2003). *80 Piwulang Ungkapan Orang Jawa. Pendidikan Budi Pekerti Membentuk Manusia Berhati Mulia*. Jakarta: Yayasan “Yusula”.
- Senen, Anwar. (2015). Model Pengembangan Karakter Toleran Berbasis Kearifan Lokal Jawa Melalui pendekatan Kontekstual. Studi Pendidikan IPS di SD di Kabupaten Sleman. *Disertasi*. Pascasarjana UPI Bandung.
- Sukadi. (2012). *Sosok Ideal Pendidik Untuk Menyiapkan Manusia Indonesia Berkarakter Unggul Generasi 2045*. Konapsi 7 konvensi nasional Indonesia VII di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sudrajat, Akhmad. (2010) *Apa Pendidikan Karakter Itu?* <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/> diakses 27/9/2013.
- Winataputra, Udin S. (2008). “Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia.” *Makalah diskusi dalam Dialog Multikultural untuk Membina Kerukunan Antarumat Beragama* yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI dan Kedeputan Bidang Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Republik Indonesia, tanggal 12 Agustus 2008, di Auditorium JICA FMIPA UPI, Bandung.
- Wiyani, Novan Ardy. (2013). *Membumikan Pendidikan Karakter di SD*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.